

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Komunikasi Politik

Selama dekade terakhir, lingkungan media dan sistem komunikasi politik telah berubah secara mendasar. Perubahan-perubahan ini memiliki konsekuensi besar untuk lingkungan informasi politik dan sejauh mana mereka membantu orang menjadi warga negara yang terinformasi. Terhadap latar belakang ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penelitian tentang perubahan dan tren utama dalam lingkungan informasi politik dan menilai implikasi demokrasi. maka fokus pada demokrasi pasca-industri maju dan enam masalah yang semuanya terkait erat dengan penyebaran dan perolehan pengetahuan politik: menurunnya pasokan informasi politik, penurunan kualitas berita, peningkatan konsentrasi media dan penurunan keragaman berita, meningkatkan fragmentasi dan polarisasi, meningkatkan relativisme dan meningkatkan ketimpangan dalam pengetahuan politik (Van Aelst et al., 2017)

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah, Makna komunikasi politik disini sudah bukan hal yang baru bagi dunia politik ataupun disiplin ilmu komunikasi. Komunikasi politik disini menurut (Djuyandi, 2017) yaitu sebuah gabungan yang lebih dari dua disiplin ilmu akademik kedalam suatu aktivitas, terutama dalam ada hubungannya yang terkait dengan komunikasi dan politik. Tersedianya komunikasi politik paling sering terjadi di media sosial

maupun di media cetak, untuk dari itu media sosial mempunyai peran penting dalam sistem politik dan suksesnya komunikasi politik sangat akan berpengaruh pada pematapan politik.

Komunikasi politik disini sangat memaikan peran penting sebagai pembuatan kebijakan dalam sistem politik (McNair, 2015). Dari apa yang telah dikemukakan oleh McNair kalau komunikasi politik itu berbicara tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, otoritas pemerintah yang diberi kekuasaan untuk membuat keputusan baik dalam bidang legislatif maupun eksekutif, dan sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Kesuksesan dari komunikasi politik tidak hanya berpengaruh pada pesan politik saja, tetapi juga pada aktor politik (politikus), aktivis dan juga lembaga pemerintah yang menyampaikan pesan politik itu.

Komunikasi dan politik bertemu dalam dua hal, yaitu pembicaraan dan pengaruh atau mempengaruhi, sehingga komunikasi politik dapat disebut sebagai sebuah pembicaraan untuk mempengaruhi. Pembicaraan merupakan substansi dari komunikasi dan mempengaruhi merupakan substansi dari politik. Maka dari itu, komunikasi politik merupakan pesan untuk mempengaruhi khalayak agar setuju dengan suatu ideologi. (Norris, 2017) dalam penelitiannya menjelaskan ada tiga bagian penting dalam komunikasi politik, yaitu produksi pesan, isi pesan dan efek pesan. Produksi pesan melihat bagaimana pesan diproduksi oleh politisi. Isi pesan mencakup jumlah dan bentuk pesan politik yang dipublikasikan serta efek pesan pesan yang memberikan perhatian pada masyarakat sebagai sasaran penyampaian pesan para aktor politik.

Riswandi (2015) juga menjelaskan bahwa fungsi dari komunikasi politik adalah struktur politik yang menyerap berbagai aspirasi, pandangan, dan gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkannya sebagai bahan dalam penentuan kebijakan. Dengan demikian fungsi membawakan arus informasi balik dari masyarakat ke pemerintah dan dari pemerintah ke masyarakat. Dengan demikian tujuan komunikasi politik secara keseluruhan yaitu untuk untuk menciptakan kestabilan negara dan terhindar dari penyebab-penyebab negatif yang mengganggu keutuhan negara, Dan juga tujuan utama dari komunikasi politik disini adalah sebagai pembuatan kebijakan, penerapan kebijakan dan juga untuk kepentingan para aktor yang melakukan komunikasi politik tersebut.

Perubahan sosial dan teknologi juga telah mengubah metode kampanye dan gaya pemerintahan yang dilakukan oleh para politisi. Media kampanye memberikan dampak khusus pada pesan yang disampaikan dalam hal pengaruh, gaya bicara, dan gaya pengiriman. Selama masa revolusi, pamflet dan surat kabar adalah media paling populer untuk menjadi perantara bagi partai politik untuk menyajikan pernyataan dan filosofi politik mereka. Berbicara di depan umum masih dianggap sebagai salah satu metode yang paling sukses dan paling populer saat itu. Jika seseorang menginginkan kampanye yang berhasil, politisi yang berkampanye harus secara berkala menyampaikan orasi yang panjang. Acara-acara pesta atau kampanye terbuka selalu merupakan perayaan mewah, juga dihiasi spanduk, musik, dan bahkan kembang api (Nugraha, 2017).

Komunikasi politik memiliki beberapa tujuan. Anwar arifin ada 4 tujuan dari komunikasi politik. *Pertama*, membangun dan membentuk citra dan opini publik; *kedua*, mendorong partisipasi politik; *ketiga*, memenangi pemilihan; keempat, mempengaruhi kebijakan negara atau publik. Keempat hal tersebut harus berjalan karena penting demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera (Arifin, 2015). Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.

Teknologi komunikasi modern berkembang pesat, dengan implikasi sosial yang luar biasa. Inovasi-inovasi kunci yang diperkenalkan oleh teknologi ini termasuk meningkatnya daya pergaulan dan sifat kaya dari informasi dari komunikasi politik yang ditransmisikan secara digital, dan tipe baru dari struktur jaringan yang disebarluaskan. hubungan antara teknologi, komunikasi politik dan konflik politik dan kekerasan. Ada jalur yang berbeda melalui mana hal ini bisa terjadi: teknologi dapat memfasilitasi tindakan kolektif, tetapi pada saat yang sama memberikan pemerintah kesempatan untuk menyensor konten dan mengumpulkan intelijen tentang para pembangkang. Juga, efek audiens dapat diperkenalkan oleh transmisi informasi yang kaya dan instan dari daerah konflik. Kontribusi untuk masalah khusus ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Sekelompok penelitian dengan metode canggih, yang diperlukan untuk melihat apakah efek dari teknologi modern benar-benar berbeda. Kategori kedua berfokus pada komunikasi politik, dan mencoba menilai pengaruhnya terhadap konflik baik secara teoritis maupun empiris. Kategori ketiga dan terakhir membalikkan pertanyaan ini, dan melihat refleksi perang dan kekerasan di media sosial (Weidmann, 2015)

Khusus tentang komunikasi politik, populisme mengartikulasikan dan mendefinisikan populisme sebagai fenomena komunikasi. Penelitian ini memberikan tinjauan umum tentang riset komunikasi politik kerakyatan dan fokusnya saat ini. Hasil dari penelitian ini menawarkan kerangka kerja untuk penelitian yang sedang berlangsung dan menetapkan kondisi batas untuk generasi baru penelitian tentang komunikasi politik kerakyatan, dengan tujuan untuk mendorong agenda penelitian dan merancang menuju pendekatan yang lebih interaktif, sistematis, dan khususnya, perbandingan untuk mempelajari komunikasi politik populis (de Vreese & Esser, 2018)

Teknologi tentu saja mengganggu pemahaman kita tentang apa itu komunikasi, siapa yang melakukannya, bagaimana, dan apa pengaruhnya. dan seperangkat norma sosial, aturan, dan pola penggunaan yang dinamis. Tetapi bentuk dan karakter komunikasi digital berubah lagi browser bukan lagi sarana utama yang digunakan kebanyakan orang untuk menemukan infrastruktur informasi. Sebagian besar komunikasi digital tidak lagi antara orang tetapi antara perangkat, tentang orang, melalui Internet hal. Aktor-aktor politik memanfaatkan proksi teknologi dalam bentuk algoritma kepemilikan dan aktor sosial semiotomatis bot politik dalam upaya halus untuk memanipulasi opini publik. Alat-alat ini adalah perancah untuk kontrol manusia, tetapi cara mereka bekerja untuk mendapatkan kontrol atas interaksi dan organisasi seperti itu tidak dapat diprediksi, bahkan bagi mereka yang membangunnya. Jadi untuk memahami komunikasi politik kontemporer dan komunikasi modern secara luas kita sekarang harus menyelidiki politik algoritma dan otomatisasi (Paulino, 2015)

2.1.2 Sosial Media

Pemerintah mengadopsi media sosial untuk menyediakan penyebaran informasi, komunikasi, dan saluran partisipasi yang saling melengkapi di mana warga negara dapat mengakses pemerintah dan pejabat pemerintah dan membuat keputusan berdasarkan informasi. Dengan menggunakan data survei e-government nasional 2009 dari Pusat Riset Pew, penggunaan media sosial pemerintah secara signifikan dan positif terkait dengan persepsi transparansi pemerintah, bahwa persepsi transparansi pemerintah positif secara signifikan terkait dengan kepercayaan pada pemerintah dan persepsi transparansi pemerintah memediasi hubungan antara penggunaan media sosial pemerintah dan kepercayaan pada pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial adalah sarana yang efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan warga negara terhadap pemerintah dengan meningkatkan persepsi mereka tentang transparansi pemerintah (Song & Lee, 2016).

Sosial media didefinisikan sebagai sebuah aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi Web 2.0 . Potensi media sosial tampaknya paling menjanjikan dalam konteks politik karena mereka dapat menjadi pendukung untuk lebih banyak partisipasi dan demokrasi. (Stieglitz & Dang-Xuan, 2015) juga mendefinisikan partisipasi publik sebagai proses dimana perhatian publik, kebutuhan dan nilai-nilai dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan pemerintah dan perusahaan. Yang disebut e-partisipasi tidak hanya berfokus pada proses ini tetapi juga pada penggunaan Internet sebagai instrumen tambahan atau eksklusif untuk membuat dialog antara yang terpilih dan pemilih. Ada badan

penelitian yang berkembang yang berfokus pada peran media sosial dalam musyawarah politik.

Aplikasi media sosial lambat laun digunakan di semua tingkat pemerintahan. Dinamika organisasi yang mendasari keputusan adopsi dan penggunaan mengikuti proses yang serupa dengan gelombang teknologi informasi dan komunikasi sebelumnya, perbedaan organisasi dari jenis-jenis teknologi informasi dan komunikasi baru ini, awalnya ditujukan untuk penggunaan individu dan tersedia melalui pasar, termasuk aplikasi media sosial (Mergel & Bretschneider, 2013)

Media sosial didefinisikan sebagai “sekelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun dasar ideologis dan teknologi dari Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran Konten yang Dihasilkan Pengguna (Nurmandi et al., 2018). Perkembangan alat media sosial selama dekade terakhir telah mengubah mode komunikasi antara pemerintah dan warga negara dalam berdiskusi setiap hari di mana komunikasi tersebut telah membuka jalan bagi partisipasi politik yang lebih besar, sehingga menciptakan dinamika sosial baru Media sosial adalah bagian dari tren yang lebih luas dalam lanskap komunikasi yang ditandai oleh kolaborasi massa, itu bertanggung jawab atas sebagian besar waktu yang dihabiskan dengan online.

Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial. Itu mempengaruhi kepercayaan, nilai-nilai, dan sikap orang, juga niat dan perilaku mereka. Sementara itu, media sosial memungkinkan pemerintah dan organisasi untuk melibatkan orang sambil memungkinkan konsumen untuk membuat

keputusan yang tepat. media sosial telah menjadi kekuatan kuat demokratisasi. Media sosial memungkinkan komunikasi dan kolaborasi antar individu dalam skala besar tanpa kendala geografis, waktu, dan sistem. Oleh karena itu, mengubah konten media sosial menjadi informasi, konsep utama, dan tema sangat penting untuk menghasilkan pengetahuan dan merumuskan strategi (Lai & To, 2015)

Media sosial merupakan wadah yang tepat untuk digunakan oleh para politisi untuk mempengaruhi publik. Media sosial menjadi mesin untuk membuat bahasa dan mesin pemaksa khalayak untuk menerima informasi hingga terbentuk opini publik yang dapat berpengaruh terhadap pilihan politik khalayak (Ananta, 2017). Media sosial dipengaruhi oleh tekanan ekonomi politik yang menghidupkan industri media tersebut. Media sosial sangat mempengaruhi dunia politik dengan berbagai cara, tak hanya kepada aktor politik, tetapi juga kepada masyarakat biasa. Media dan dunia politik adalah hubungan tidak dapat terpisahkan secara struktural sebagai agen masyarakat.

Dampak media sosial dalam kampanye politik di seluruh dunia tidak dapat disangkal. Statistik terbaru menunjukkan bahwa hampir adults orang dewasa AS menggunakan situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter, dengan penggunaan jejaring sosial menjadi hampir di mana-mana di kalangan orang dewasa muda, menurut data terbaru dari Pew Research Center (2018). Secara global, diperkirakan 2,62 miliar orang menggunakan jejaring sosial setiap hari pada 2018, Dengan pertumbuhan luar biasa ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kampanye politik modern, baik di Amerika Serikat maupun internasional. Platform seperti Facebook, Twitter atau Reddit telah mengubah cara

kampanye politik dijalankan, bagaimana politisi dan publik mengakses dan berbagi informasi politik, cara kita belajar tentang politik, membentuk opini dan sikap, dan pada akhirnya terlibat atau melepaskan diri dari proses politik (Dimitrova & Matthes, 2018)

Dalam sosial media, diskusi politik individu yang terhubung sosial media dan memanfaatkan secara sama pengaruh potensial yang berasal dari lokasi jaringan yang lebih sentral. Individu populer yang memiliki lebih banyak koneksi langsung ke anggota jaringan lain lebih sering berdiskusi tentang politik tetapi dalam interaksi yang lebih aman secara politik yang meminimalkan risiko sosial, lebih memilih diskusi yang lebih melibatkan dengan orang lain yang berpikiran sama dan mengedit pengaturan privasi mereka untuk menjaga pengungkapan politik mereka. Penjaga gerbang yang memfasilitasi koneksi antara lebih banyak pasangan anggota jaringan yang tidak terhubung juga membahas politik lebih sering, tetapi lebih cenderung terlibat dalam diskusi yang toleran terhadap risiko (Bruno, 2019).

Survei online untuk memeriksa paparan insidental terhadap berita di media sosial (Facebook, YouTube, Twitter) di empat negara (Italia, Australia, Inggris, AS). Mengesampingkan mereka yang mengatakan bahwa mereka sengaja menggunakan media sosial untuk berita, kami membandingkan jumlah sumber berita online yang digunakan oleh pengguna media sosial yang tidak melihatnya sebagai platform baru, tetapi dapat menemukan berita saat menggunakannya (yang secara tidak sengaja terbuka), dengan orang-orang yang tidak menggunakan media sosial sama sekali (non-pengguna). Kami menemukan bahwa penggunaan yang tidak disengaja secara signifikan menggunakan lebih banyak sumber berita daring

daripada bukan pengguna, pengaruh paparan insidental lebih kuat untuk orang yang lebih muda dan mereka yang memiliki minat rendah pada berita, dan lebih kuat untuk pengguna YouTube. dan Twitter daripada untuk pengguna Facebook (Fletcher & Radcliffe, 2015)

Situs media sosial seperti Twitter terutama digunakan oleh populasi yang lebih muda, yang kadang-kadang juga enggan atau tidak mampu mengartikulasikan apa yang mereka rasakan berkaitan dengan depresi dan pikiran untuk bunuh diri dalam pengaturan tatap muka. Belum ada penelitian yang meneliti data Twitter untuk memahami jenis-jenis pikiran berulang yang dialami individu mengenai gejala mereka (atau tentang bunuh diri), Akhirnya, temuan di sini memiliki implikasi penting bagi informatika kesehatan masyarakat. Sejauh ini, media sosial telah digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat (Nambisan, Luo, Kapoor, Patrick, & Cisler, 2015)

Dengan media sosial digaris depan konteks media saat ini, warga negara mungkin merasa mereka tidak perlu mencari berita secara aktif karena mereka akan terpapar dengan berita dan tetap mendapat informasi melalui rekan-rekan mereka dan jejaring sosial. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa label ini "persepsi penemuan berita," dan menguji penerapannya untuk pencarian berita dan pengetahuan politik: "efek penemuan berita." data panel-survey menunjukkan bahwa orang-orang yang melihat berita akan menemukan mereka lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan sumber berita tradisional dan kurang memiliki pengetahuan tentang politik dari waktu ke waktu. Meskipun persepsi berita memberikan terkait gambaran positif dengan paparan berita di media sosial,

perilaku ini tidak memfasilitasi pembelajaran politik. Hasil ini menunjukkan berita terus meningkatkan pengetahuan politik terbaik saat aktif dicari (Gil de Zúñiga, Weeks, & Ardèvol-Abreu, 2017)

Perkembangan komunikasi dan teknologi informasi memudahkan interaksi antara individu dan kelompok. Lalu lintas pesan dan berita tidak sepenuhnya dikendalikan oleh negara, tetapi bebas mengalir ke publik (Susanto, 2017). Oleh karena itu, media sosial yang memiliki kekuatan untuk menyebarkan informasi, menjadi pilihan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan melakukan tindakan yang diinginkan oleh penyebar pesan. Pada saat yang sama, dominasi media massa arus utama mulai memudar pengguna media sosial tidak terikat oleh status sosial, ekonomi dan politik; Media sosial dan media massa arus utama memiliki karakter berbeda dalam menyebarkan pesan ke audiens; Dan media sosial adalah pendukung jaringan komunikasi politik dalam demokrasi negara.

Media sosial pada jaman sekarang telah menjadi salah satu sumber pengaruh dalam agenda politik. keberadaan efek media pada agenda politik, khususnya pada agenda parlementer. Agenda kekuatan media bergantung, pada isu yang dipertaruhkan, pihak-pihak yang berada di pemerintahan atau di pihak oposisi, dan mengenai kepemilikan pihak atas isu-isu yang akan dimainkan dalam politik (Nulty, Theocharis, & Popa, 2016)

Kampanye presiden AS baru-baru ini pada tahun 2008 telah menunjukkan bahwa teknologi media sosial menjadi semakin penting untuk komunikasi dan persuasi politik (Sunil Wattal, David Schuff, 2019) . Menjadi jelas, bahwa media

sosial dapat berhasil diadaptasi untuk menghubungi dan berdiskusi dengan para pemilih serta untuk menyebarkan informasi penting kepada mereka. Terutama orang muda terinspirasi untuk topik-topik politik menggunakan media sosial sebagai platform komunikasi. Di bagian ini, memberikan ikhtisar pekerjaan terkait di media sosial dalam konteks politik.

Penelitian dari (Harrera, 2016) mengungkapkan bahwa situs yang ada di media sosial saat ini awalnya muncul berdasarkan sebuah ide atau pikiran untuk mengumpulkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Media sosial sendiri adalah sebuah teknologi yang digunakan secara efektif untuk berkomunikasi dengan orang lain. Media sosial, terutama twitter tidak hanya merambah ke selebriti – selebriti di Indonesia saja, melainkan juga masuk kedalam dunia politik. Buktinya banyak sekali pelaku politik yang sudah mulai menggunakan media sosial twitter ini. Tidak jarang juga mereka yang dapat melihat celah yang ada dari sebuah akun twitter yang mereka punya, dapat memanfaatkannya sebagai sarana untuk mempermudah pekerjaan mereka. Ada dua sosok kepala daerah yang sangat aktif menggunakan media sosial twitter miliknya, yaitu Ridwan Kamil, seorang walikota Bandung, Jawa Barat, serta gubernur dari Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo.

Menempatkan peran yang dimainkan media sosial dalam aksi kolektif dalam struktur teoretis yang lebih umum, menggunakan peristiwa Musim Semi Arab sebagai studi kasus. Penelitian ini menyajikan dua prinsip teoretis yang luas. Yang pertama adalah bahwa seseorang tidak dapat memahami peran media sosial dalam aksi kolektif tanpa terlebih dahulu memperhitungkan lingkungan politik tempat mereka beroperasi. Prinsip kedua menyatakan bahwa peningkatan yang signifikan

dalam penggunaan media baru jauh lebih mungkin untuk mengikuti sejumlah besar kegiatan protes daripada mendahului itu. Studi ini meneliti dua prinsip ini menggunakan data politik, media, dan protes dari dua puluh negara Arab dan otoritas Palestina (Wolfsfeld, Segev, & Sheaffer, 2016)

Pengenalan alat media sosial, termasuk situs jejaring sosial, blog, wiki, dan microblog, ke dalam konteks organisasi melanjutkan tren panjang membuat komunikasi di tempat kerja terlihat. Namun, seperti yang ditunjukkan (Treem; Leonardi, 2012) dalam ulasan terperinci mereka, media sosial membuat komunikasi rutin antara rekan kerja. Ini yang menjadi alasan kenapa sosial media bisa mempermudah para politisi. Dari banyak teknologi komunikasi sebelumnya. media sosial mempercepat langkah teknologi yang memungkinkan komunikasi politik sehingga kita memasuki era big data di mana siapa pun dapat dengan mudah melihat dengan mudah apa yang dikatakan orang lain dan kepada siapa (Leonardi, 2014)

Media sosial pada era digital saat ini tidak hanya sebagai media komunikasi bagi para aktor politik tapi juga di manfaatkan sebagai wadah untuk mempromosikan diri atau yang lebih di ketahui sebagai *political branding*. Seperti pada penelitian (Sandra, 2015) mengungkapkan bahwa pada tahun 2012 lalu dibandingkan dengan aktor politik lain yang ada di Indonesia, dalam melakukan *political branding* Jokowi menggunakan sosial media twitter dan mempunyai tugas tersendiri lebih dilihat dari dimensi waktu dimana ia membangun *political branding* tersebut yakni pada masa kampanye guna mendapatkan vote rakyat. Setelah dari *political branding* yang dibentuk Jokowi melalui media sosial twitter, secara tidak langsung twitter sebagai akun personal Jokowi yang digunakan secara aktif selama

masa kampanye gubernur DKI Jakarta, mempunyai peran dalam penyampaian pesan *political branding* Joko Widodo.

Anies Baswedan juga melakukan *branding politic* yang aktif di media sosial. memiliki pengaruh yang cukup kuat di sekitar media sosial. Dia memiliki keterlibatan yang kuat dengan para pengikutnya. Setiap media sosial dan situs webnya telah memenuhi kriteria yang disyaratkan untuk dianggap sebagai situs web kampanye yang tepat. Namun, dampak yang disebabkan oleh media sosial dan situs web tersebut sulit diukur. Berbagai dan berbagai strategi pengukuran serta otoritas pemilik akun adalah salah satu dari banyak faktor dalam memutuskan apakah pengukuran yang dipilih memberikan akurasi yang tepat (Nugraha, 2017).

Selanjutnya dalam penelitian (Suardi, 2016) menjelaskan bahwa di masa yang akan datang komunikasi politik melalui sosial media di Indonesia akan semakin seru dan menarik. dikarenakan jumlah massa yang banyak dan luas terutama dikalangan generasi muda kian bertambah. Untuk itu seharusnya politisi bisa meningkatkan kepiawaian mereka untuk mempengaruhi rakyat. Rakyat semakin cerdas, pemimpin yang hanya sekedar menggunakan pencitraan akan ditinggalkan. Pemimpin otentik dan dekat dengan rakyat akan semakin digandrungi. Di indonesia seharusnya dari sekian banyak komunikator politik sudah seharusnya melangkah jauh ke arah sosial media dan menggunakan pola komunikasi yang *empati* dan *homofil*. Karena pemimpin yang berintegritas akan berhasil memimpin negara ini, pemimpin yang mau berkorban dan mau mengabdikan pada bangsa dalam konteks yang sebenarnya. Pemimpin yang seperti ini yang disebut sebagai pemimpin masa depan.

2.1.3 Twitter

Baru-baru ini, lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia adalah anggota jaringan Twitter. Twitter juga menghitung total lebih dari 100 juta pengguna. Dengan pertumbuhan yang luar biasa dari beberapa media sosial ini, dikatakan bahwa dari sudut pandang politisi dan partai politik, penting untuk secara aktif berpartisipasi dalam komunikasi politik melalui media sosial, terutama selama kampanye pemilu. Dalam hal ini, politisi A.S. dikatakan memainkan peran utama. Contoh paling menonjol adalah Barack Obama yang berhasil menggunakan media sosial dalam kampanye pemilihan terakhirnya (Stieglitz & Dang-Xuan, 2016)

Twitter pada dasarnya memiliki kegunaan hampir sama dengan media sosial lainnya, penggunaannya bisa mengunggah foto, video, dan bertukar pesan yang dikenal sebagai Tweets, unggahan-unggahan tweets yang bisa langsung diunggah menggunakan *smartphone* memudahkan penggunaannya salang bertukar informasi secara cepat dan melaporkan berita-berita penting langsung dari lokasi kejadian (Kongthon, 2014).

Salah satu media baru yang bisa mengekspresikan pendapat adalah twitter. Twitter menjadi media sosial yang paling banyak penggunaannya di Indonesia. Seiring dengan bertambahnya popularitas twitter, muncul masyarakat yang aktif memproduksi dan menyebar informasi. Hal tersebut dapat memberi kesempatan untuk memperluas interaksi sosial dan meningkatkan komunikasi politik dan partisipasi politik masyarakat sipil (Kade Galuh, 2016). Pengguna tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bisa terlibat aktif untuk memperdebatkan suatu

wacana politik, juga fungsi dan potensi yang dimiliki oleh twitter dimanfaatkan oleh para aktor politik .

Pada buku kuasa media di indonesia yang ditulis oleh (Ross Tapsell, 2017) mencoba mengungkapkan kalau kasus yang ada di indonesia sangat pas digunakan untuk mencari tau bagaimana media digital bisa mempengaruhi orang banyak. Pada saat yang bersamaan kekuatan media juga berpartisipasi bergerak dengan masif, orang indonesia tergolong sebagai pengguna media sosial paling aktif se-dunia. Sebesar 70 persen populasi dari jumlah penduduk di indonesia berada di bawah usia 35 tahun, yang sebagian besarnya memakai media sosial setiap harinya. Bahkan 64 juta penduduk di indonesia memakai facebook pada tahun 2015, menduduki peringkat ke empat tertinggi di dunia. Sementara itu ada 20 juta penduduk indonesia yang memiliki akun twitter, menduduki peringkat tiga tertinggi di dunia. uniknya jakarta adalah kota yang dijuluki sebagai kota paling aktif di twitter, dengan sebagian besar tweet per hari dikirim dari kota ini.

Layanan dari referensi 2.0 pada dasarnya fenomena yang muncul pengguna untuk dilayani. Pada saat ini masyarakat sudah menginginkan informasi secara cepat atau yang dikenal dengan generasi digital. Salah satu inovasi tersebut adalah media sosial, karena dengan menggunakan sosial media bisa lebih optimal seperti penghematan biaya, distribusi informasi yang cepat dan interaksi antara pengguna lebih mobile (Anwar, 2016). Contohnya adalah twitter yang merupakan layanan jaringan sosial untuk memungkinkan para pengguna untuk mengirim dan membaca pesan dan mengirim tweet, akan tetapi bagi mereka yg belum terdaftar

akan hanya bisa untuk membaca saja. Pengguna yang mau membuka twitter bisa melalui website, SMS, atau melalui perangkat mobile lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemerintah telah bekerja untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam tindakan mereka. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dipandang oleh banyak orang sebagai cara yang hemat biaya dan nyaman untuk mempromosikan keterbukaan. dengan adanya sosial media twitter inilah yang tidak jarang di dimanfaatkan oleh pemerintah atau aktor politik sebagai media yang bisa mempermudah pekerjaannya, nyatanya sekarang banya kepala daerah yang sudah menggunakan twitter sebagai media untuk mendengarkan keluhan–keluhan dan masukan dari warganya, untuk kemajuan daerah tersebut. Dan di indonesia sendiri hal tersebut sudah dilakukan oleh beberapa kepala daerah yang memang aktif sekali dalam bermain media sosial media twitter ini dalam melakukan komunikasi politik (Bertot, Jaeger, & Grimes, 2015).

2.1.4 E-Government

E-Government mengacu pada penggunaan TIK untuk meningkatkan efisiensi fungsi internal dan proses pemerintahan (Twizeyimana & Andersson, 2019). Misalnya, e-government menghubungkan berbagai departemen dan lembaga, sehingga membuat arus informasi lebih cepat dan lebih mudah di antara departemen pemerintah yang berbeda. kebutuhan untuk menggunakan TIK untuk meningkatkan hubungan antara warga negara dan negara, dengan implikasi untuk proses demokrasi dan struktur pemerintah.

E-Government berperan sebagai sebagai upaya untuk memanfaatkan dan memanfaatkan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah, memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, memberikan akses informasi kepada publik secara lebih luas, pemerintah lebih bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat (Putra et al., 2018).

Tata kelola e-government bertujuan untuk meningkatkan informasi dan layanan pengiriman lembaga sektor publik. Pengelolaan e-goverment juga mengacu pada penggunaan TIK, dan khususnya internet, sebagai alat untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik e-government juga memfasilitasi sampel yang lebih luas untuk penilaian kesiapan pasar dan sistem pengadaan elektronik yang terintegrasi menuju pemantauan dan evaluasi dalam pelayanan publik yang lebih yang efektif (Adjei-Bamfo, Maloreh-Nyamekye, & Ahenkan, 2019).

Menurut (Andi Syamsul & Achmad Nurmandi, 2017) Adopsi Inovasi Teknologi oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia adalah hasil dari eraturan dan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini dimulai ketika pemerintah pusat memberlakukan, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Tim ini mengkoordinasikan pengembangan TIK di sektor-sektor pemerintah dan swasta. Pada tahun 2001, pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Rencana Aksi Teknologi Informasi Komunikasi Nasional. Rencana aksi ini menyatakan bahwa TIK harus digunakan untuk memberdayakan warga negara, meningkatkan kesejahteraan mereka, mengurangi kemiskinan, dan menghilangkan kesenjangan digital.

Pemerintah daerah adalah yang berada di garis depan pemberian layanan publik, harus mengikuti praktik e-government untuk memenuhi keharusan efisiensi, efektivitas, inklusi sosial dan transparansi dalam pemerintahan (Batara, Nurmandi, Warsito, & Pribadi, 2017). Dalam konteks e-government, warga negara dan pegawai pemerintah harus dilihat berbeda. Warga berada di sisi permintaan dari spektrum pemberian layanan publik. Menggunakan TIK pada akhirnya bersifat sukarela dan juga bergantung pada kemampuan dan aksesibilitas teknologi mereka. Di sisi lain, pegawai pemerintah adalah aktor sisi penawaran yang penting, yang berada di garis depan pemberian layanan publik.

ICT tentu meningkatkan efisiensi pemerintah, efektivitas dalam bentuk pelayanan publik dengan memperluas sekaligus mempromosikan tatakelola pemerintahan yang baik dan aktif berkomunikasi dengan masyarakat. E-government juga dapat meningkatkan demokrasi dan memiliki implikasi yang luas untuk pertumbuhan untuk negara berkembang. Pada penerapannya, E-government banyak dilakukan di negara berkembang yang memiliki masalah yang sangat kompleks dan beragam tantangan dan hambatan dalam melakukan implementasinya (Waller & Genius, 2015).

E-Government sangat berkontribusi dalam konteks dari berbagi segi disiplin ilmu yang terkait dengan komunikasi, studi pemerintah dan bidang terkait lainnya. Perencanaan strategis TIK dalam pengembangan e-government digunakan untuk keperluan strategi bisnis, organisasi pemerintah dan strategi TIK sehingga mendapatkan nilai tambah dari suatu organisasi pemerintahan, agar pelayanan

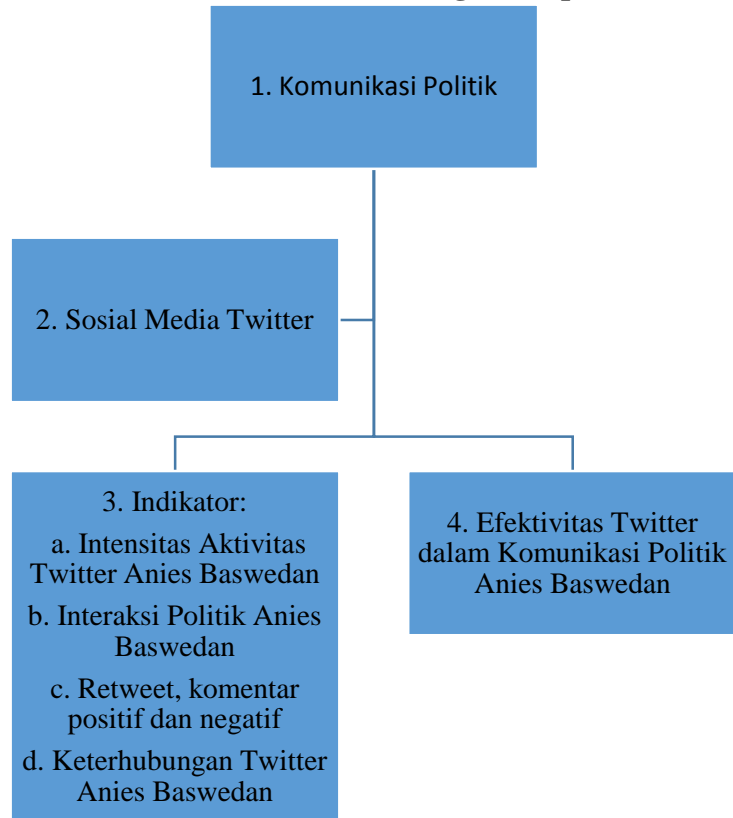
pemerintah menjadi lebih maksimal dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat menjadi tepat sasaran (Asyikin, Fitri, & Nugroho, 2016).

Dengan pentingnya e-government untuk transparansi, akuntabilitas, dan layanan publik yang lebih baik, masalah adopsi warga negara tingkat rendah terhadap layanan e-government telah diakui di negara-negara maju dan berkembang (Al-Hujran, Al-Debei, Chatfield, & Migdadi, 2015). menemukan bukti kuat bahwa sikap warga negara terhadap penggunaan layanan e-government adalah penentu paling signifikan dari niat warga negara untuk mengadopsi dan menggunakan layanan e-government. Sikap warga negara, pada gilirannya, ditentukan bersama oleh persepsi nilai publik dan persepsi kemudahan penggunaan. Hasil ini memiliki implikasi manajerial bahwa pemerintah perlu memperhatikan lebih dekat untuk mempengaruhi sikap warga terhadap penggunaan layanan e-government.

Ada literatur substansial tentang e-government yang membahas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai instrumen untuk mengurangi peran birokrasi dalam organisasi pemerintah. Menggunakan konsep e-birokrasi dan penyederhanaan fungsional dan penutupan, hasil dari penelitian ini mengusulkan bukti dan dukungan untuk argumen bahwa birokrasi harus dilestarikan dan ditingkatkan dimana kebijakan e-government terkait. Penyederhanaan dan penutupan fungsional adalah konsep yang sangat berharga untuk menjelaskan mengapa ini harus menjadi pendekatan yang layak (Cordella, A., &Tempini, 2015)

2.2 Kerangka Pikir

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020

2.3 Definisi Konsepsional

Definisi Konseptual Merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalah paham terhadap pengertian pengertian dan batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Pengertian konseptual dalam pembahasan ini adalah:

Komunikasi Politik adalah suatu proses pengoperan lambang-lambang komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Sosial Media adalah sebuah media yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi tanpa ada batasan ruang dan waktu, media sosial secara makna juga bisa diartikan sebagai media atau sarana yang digunakan oleh manusia dalam rangka bersosialisasi oleh sesamanya.

Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter kata, mengupload gambar dan video yang dikenal dengan sebutan tweet, unggahan-unggahan tweets yang bisa langsung diunggah menggunakan *smartphone* memudahkan penggunaanya saling bertukar informasi secara cepat dan melaporkan berita-berita penting langsung dari lokasi kejadian.

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatin. Ruang dalam penelitian ini adalah pengaruh komunikasi politik dalam sosial media Twitter.

Tabel 2.1 Definisi Operasional

Dimensi	Variabel (Komunikasi Politik)	Indikator (Twitter)	Sumber
Sosial Media	Anies Baswedan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyampaian pesan-pesan politik yang dapat mempengaruhi opini publik.2. Intens dan interaktif dalam melakukan komunikasi politik .3. Efektif dalam mengirim pesan (Tweet).	<ol style="list-style-type: none">1. (Norris, 2017)2. (Purbohastuti, 2017)3. (Stieglitz & Dang-Xuan, 2016)

Sumber : data Diolah oleh peneliti, 2020